

KAJIAN YURIDIS RUANG GERAK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

IK. Rai Setiabudhi¹

ABSTRAK

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan masyarakat/LSM, telah diatur dalam The United Nations Convention Against Corruption 2003, khususnya pada Pasal 13 disebutkan antara lain, bahwa "masing-masing negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya; meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Selanjutnya bagaimana pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan kita terhadap ruang yang diberikan kepada LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ketetapan MPR-RI Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. antara lain disebutkan di samping itu terdapat desakan yang kuat dari masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, memberikan kesempatan kepada masyarakat/LSM untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Bab V, khususnya pada Pasal 41 dan Pasal 42. Demikian pula halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Secara lebih khusus peran serta masyarakat dalam hal ini lebih banyak dilakukan oleh LSM, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Udayana-Bali.

Agar LSM memiliki ruang gerak dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kepada pemerintah, untuk memberikan perhatian kepada LSM mencakup antara lain: Pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit tentang kedudukan/ keberadaan, bagi LSM untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, adanya pengakuan/ jaminan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah, bahwa LSM diberikan ruang yang jelas secara independen dalam upaya pemberantasan korupsi; Ketiga, menjamin akses LSM terhadap sumberdaya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya.

Kata kunci : Kajian yuridis, Lembaga swadaya masyarakat, Pemberantasan korupsi

A. PENDAHULUAN

Masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini adalah masalah korupsi. Sesungguhnya Indonesia negara kaya, tetapi karena korupsi terus merajalela, maka kesejahteraan yang mestinya dapat dinikmati oleh rakyat banyak semakin jauh dari harapan. Misalnya saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia sangat memprihatinkan. *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin secara riil di Indonesia mencapai 129,6 juta orang, atau sekitar 66,3% dari seluruh jumlah penduduk.² (namun ukuran kemiskinan Indonesia berbeda, sehingga angka kemiskinannya sekitar 13-15%). Kondisi ini terjadi menurut hemat saya disebabkan suburnya korupsi di Republik ini.

Saat ini terkait dengan posisi Indonesia tentang indeks persepsi korupsi (IPK), berdasarkan info dari berbagai sumber bahwa IPK Indonesia sudah mengalami

kenaikan yang cukup signifikan sejak reformasi, di mana IPK Indonesia sekitar sepuluh tahun yang lalu hanya 2.0. Namun saat ini telah mengalami kenaikan menjadi 3.0, bahkan lebih. Walaupun demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, ternyata tahun 2012 Indonesia mengalami kemunduran dibanding setahun sebelumnya yaitu dari urutan 110 menjadi nomor 118 di dunia.

Di tengah-tengah memperingati hari anti korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, di mana perayaan hari korupsi sedunia pada tahun ini, Lembaga Swadaya Masyarakat *Transparency International Indonesia* (TII), menyampaikan laporannya yang menempatkan Partai Politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Sedangkan lembaga lain adalah Peradilan, dan Kepolisian³

² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 136.

³ Emerson Yuntho, *Indonesia Corruption Watch, Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar 8 Desember 2011.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan masyarakat, dalam *The United Nations Convention Against Corruption 2003*, pada Pasal 13 disebutkan, bahwa,

*Each state party shall take appropriate measures, within its means and in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to promote the active participation of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, non governmental organizations and community-based organizations, in the prevention of and the fight against corruption*⁴ (Masing-masing negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya; meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan kegawatan dari dan ancaman yang ditunjukkan oleh korupsi). Maksud dari ketentuan ini adalah mewajibkan semua negara penerima/pihak untuk mengikutsertakan masyarakatnya dalam pem-

berantasan tindak pidana korupsi, dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki, baik itu melalui lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.⁵

Pemegang kedaulatan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mencetuskan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bagian yang menjadi pertimbangan penting dalam Ketetapan itu adalah : bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna; Dan bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan kelompok orang tertentu dan menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat ada tiga komponen yang

⁴ *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, hlm.7.

⁵ *Gap Analysis Indonesian Laws versus The United Nations Convention Against Corruption (draft report)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, t.t, hlm.35.

selalu saling berhubungan. Ketiga komponen tersebut adalah negara/pemerintah(*state*), Pasar/bisnis(*market*), dan Masyarakat Sipil(*Civil Society*). Karena itu saya ingin mengkaji dari aspek hukumnya bagaimana ruang gerak LSM yang mewakili masyarakat sipil di jamin oleh peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sampai saat ini fungsi LSM yang meliputi hak, tugas maupun tanggungjawab yang diberikan kepada LSM di Indonesia masih sangat terbatas. Berbeda halnya bila dibandingkan dengan hak NGO (di Indonesia disebut LSM) di beberapa negara lain yang telah berhasil memberantas korupsi. Misalnya : Singapura, Korea Selatan, Hongkong, Australia (*New South Wales*), dan lain-lain.

Di Korea Selatan, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi juga gencar dilaksanakan dan cukup berhasil. Upaya itu dilakukan berdasarkan Peraturan Pencegahan Korupsi Republik Korea Selatan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Pengumuman Peraturan Nomor 6494. Pemberantasan korupsi di Korea, selalu di dorong oleh semangat dan dukungan masyarakat umum. Di negara tersebut juga dibentuk lembaga independen yang memiliki fungsi mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Lembaga ini diberi nama Komisi Independen Anti Korupsi Republik Korea Selatan, yang didirikan pada tanggal 25 Juli

2002.

Nam-Joo Lee, Ketua Komisi Independen Pemberantasan Korupsi (KICAC) Korea Selatan, dalam suatu kesempatan mengemukakan bahwa,

*"There are sectors, the government, business and civil society. Among the tree, the last one is creating a free-spirited and independent sphere. It has established new set of rules for reform and presented new values through the interaction with the other two sector. Varied changes, political, economic, and social, have been achieved through this process."*⁶

(Secara umum di Korea ada tiga sektor, yaitu: pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil. Di antara ketiga sektor itu, sektor yang terakhir yaitu masyarakat sipil menciptakan semangat kebebasan dan suasana kemandirian. Ia telah menetapkan seperangkat aturan-aturan baru untuk memperbaiki dan memberikan nilai-nilai baru melalui interaksi dengan kedua sektor yang lain. Berbagai perubahan politik, ekonomi dan sosial telah dicapai melalui proses ini terutama dalam upaya penanggulangan korupsi).

Lebih lanjut ketua KICAC menyatakan :

"However, the government's anti corruption convictions and an institutional framework by themselves cannot thoroughly eradicate corruption. Only

⁶ Nam-Joo Lee, *Korea's Anti-Corruption Strategies and the Role of Private Sector*, UN Round Table Presentation, December 9, 2003, Korea Independent Commission Against Corruption, hlm.2.

*when there are continued assistance from the private sector such as monitoring and control by civil society and corporate reforms in governance and ethics, our policies can work effectively.*⁷

(Lembaga anti korupsi milik pemerintah dengan rencana kerja yang dibuat oleh mereka sendiri, tidak dapat dengan sempurna memberantas korupsi. Hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan jauh lebih baik bilamana masyarakat sipil (NGO/LSM) ikut aktif dan penuh perhatian, seperti memonitor dan mengawasi bersama-sama untuk memperbaiki moral dan kebijakan-kebijakan lain).

Dengan demikian di Korea Selatan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak bisa lepas dari fungsi masyarakat yang umumnya tergabung dalam NGO (*non-governmental organization*). Keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Korea Selatan yang sangat menentukan adalah dengan diberikannya kesempatan atau kewenangan kepada NGO untuk melakukan pencekalan (mengumumkan namanya di tempat-tempat umum) terhadap para politikus busuk dan pejabat negara yang dicurigai telah melakukan tindak pidana korupsi.

Prilaku koruptif yang berulang-ulang dilakukan oleh aparatur Negara, terutama pejabat publik, menunjukkan kegagalan Negara mewujudkan etos kerja aparatur

yang berpegang pada etika. Terkait dengan ini, Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa “hukuman mati sudah sepantasnya diterapkan di Indonesia”⁸ Sebagai perbandingan, bahwa hukuman mati bagi koruptor di Cina, misalnya: Februari 2004 Wakil Gubernur Provinsi Anhui, menerima suap sebesar 623.000 dollar AS dan tidak bias menjelaskan asal-usul rekeningnya (pembuktian terbalik) sebesar 600.000 dollar AS; Maret 2005, Bi Yuxi, administrator Beijing Road, melakukan penggelapan dana public sebesar 360.000 dollar AS, dan menerima suap 1,2 juta dollar AS; Desember 2007, Li Baojin, mantan Jaksa Penuntut Umum di Kota Tianjin Utara, menggelapkan uang dan menerima suap senilai 2.66 juta dollar AS; Juli 2007, Ziaoyu (pejabat dinas Kesehatan dan Makanan) menerima suap 850.000 dollar AS, sebagai imbalan untuk menyetujui peredaran obat yang belum teruji dan/atau palsu; Juli 2009 Cen Tonghai (Ketua China Petroleum and Chemical Corporation, menerima suap lebih dari 28 juta dollar AS; Agustus 2009, Li Peiying (mantan Presiden Capital Airports Holding Company, menerima suap sebesar 41 juta dollar AS; Juli 2010, Wen Qiang (mantan Wakil Kepala Kepolisian dan Keadilan di Chongging, menerima suap untuk melindungi para “gangster”; Juli 2011, Zhang Chunjiang (mantan Petinggi China

⁷ *Ibid*, hlm.4-5.

⁸ *Harian Kompas*, Senin 28 Nopember 2011, Politik dan Hukum, hlm.3

Mobile) karena menerima suap sebesar 1.150.000 dollar AS⁹.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, cukup banyak peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957. Ini membuktikan betapa besarnya niat atau komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi sejak dulu hingga saat ini, baik dari hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku, struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Sehingga upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit.

Di Indonesia lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dapat membantu individu warga negara untuk mendapatkan kebutuhan atau memenuhi kepentingannya. Khusus dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi dan misi

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hampir di setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota LSM telah melakukan berbagai bentuk kegiatan baik untuk mencari data adanya penyimpangan kearah korupsi maupun usaha untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Segala kegiatan yang dilakukan oleh LSM terutama dalam upaya mengungkap kasus-kasus korupsi kemampuannya telah diakui dan didukung oleh masyarakat luas. Namun di lain pihak hukum belum memberikan jaminan yang kuat terhadap ruang gerak LSM dalam upaya pemberantasan korupsi.

B. Dasar Hukum Ruang Gerak LSM

1. Berdasarkan Ketentuan Internasional

Ketentuan Internasional yang menyangkut ruang gerak LSM dikaitkan dengan pencegahan dan

pemberantasan korupsi, secara umum dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

- a. Article 6 *United Nations Convention Against corruption (UNCAC)*, 2003: Point 2 : *Preventive Anti-Corruption Body Or Bodies* (Badan atau Badan-badan Pencegah Anti Korupsi).

Each State Party shall grant the body or bodies referred to in paragraph 1 of this article the necessary independence, in accordance with

⁹ Ibid.

the fundamental principles of its legal system, to enable the body or bodies to carry out its or their functions effectively and free from any undue influence. The necessary material resources and specialized staff, as well as the training that such staff may require to carry out their functions, should be provided. (setiap negara peserta wajib memberikan ke badan atau badan-badan yang disebut dalam ayat 1 pasal ini (kebebasan yang diperlukan), sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, untuk memungkinkan badan atau badan-badan itu melaksanakan kegiatan mereka secara efektif dan bebas dari segala pengaruh yang berlebihan. Sumber daya material dan staf ahli yang diperlukan, dan juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan oleh staf itu untuk mengatur posisi mereka, wajib diadakan). Badan-badan yang dimaksudkan itu termasuk NGO/LSM. Ini berarti keberadaan badan-badan yang ikut dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi diposisikan sedemikian rupa sesuai dengan sistem hukumnya.

- b. *Article 36 United Nations Convention Against corruption (UNCAC), 2003: Specialized Authorities (Wewenang-wewenang Khusus). Each State Party shall, in accordance with the fundamental*

principles of its legal system, ensure the existence of a body or bodies or persons specialized in combating corruption through law enforcement. Such a body or bodies or persons shall be granted the necessary independence, in accordance with the fundamental principles of the legal system of the State party, to be able to carry out their functions effectively and without any undue [influence] [pressure]. Such persons or staff of such body or bodies should have the appropriate training and resource to carry out their tasks. (Setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan atau kedudukan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang wajib diberikan kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum negara peserta itu, agar supaya dapat melaksanakan aktivitas mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang seharusnya. Orang-orang itu atau staf badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka). Badan-badan ini dimaksudkan juga termasuk NGO/LSM.

- c. Article 63, *United Nations Convention Against corruption (UNCAC)*, 2003: conference of the states Parties to the convention (konfrensi Negara-Negara anggota konvensi)

Point 3 : the Conference of the states parties shall adopt rules of procedure and rules governing the functioning of the activities set forth in this article including rules concerning the admission and participation of observers, and the payment of expenses incurred in carrying out those activities. (Terjemahan bebas : konferensi Negara-negara peserta wajib mengadopsi aturan-aturan prosedur dan aturan-aturan yang mengatur berjalanya aktifitas-aktifitas yang diutarakan dalam pasal ini termasuk aturan-aturan tentang pengakuan dan partisipasi dari para [pengamat] [peninjau],—biasanya yang diundang adalah NGO/LSM). Dengan diundangnya NGO/LSM dalam kegiatan-kegiatan Internasional, ini berarti Lembaga Internasional telah mengakui keberadaan NGO/LSM dalam kiprahnya melakukan pemberantasan korupsi.

Point 4 sub c: Cooperating with relevant international and re-

gional organizations and mechanisms and non-governmental organizations (Bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan mekanisme-mekanisme internasional dan regional yang berkaitan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat). Ketentuan ini mengharapakan secara jelas untuk melakukan kerjasama dengan NGO/LSM. Ini berarti kedudukan NGO/LSM dalam hal-hal tertentu diakui sama kuat dengan lembaga-lembaga lain.

2. Ketentuan Nasional

2.1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga ketentuan ini dikembangkan selanjutnya oleh aturan di bawahnya.

2.2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR-RI Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam

pertimbangannya antara lain disebutkan bahwa, “permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara”. Di samping itu terdapat desakan yang kuat dari masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.3. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai peran serta masyarakat dalam undang-undang ini, diatur dalam Bab V, khususnya pada Pasal 41 dan Pasal 42.

2.4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Disebutkan dalam peraturan ini, bahwa yang dimaksud dengan peranserta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Secara lebih khusus peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2.5. Instruksi Menteri Dalam Negeri

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan (termasuk LSM).

Selanjutnya ruang gerak LSM berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 1. Landasan Yuridis Ruang Gerak LSM di Indonesia

No	Landasan Yuridis	Kondisi posisi LSM
1	- Pasal 28 E (3) UUD N RI 1945 - Pasal 21 (1) UUD N RI 1945	- Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat - Berhak ikut dalam penyusunan dan pengawasan anggaran
2	- Tap MPR No. XI/MPR-RI/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN - Tap MPR No. VIII/MPR-RI/2001 Tentang Arah Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	- Partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. - Mendorong partisipasi masyarakat luas/LSM dalam mengawasi dan melaporkan berbagai dugaan praktek KKN.
3	- Pasal 8 dan 9 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN.	- Tanggung jawab masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih; - Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan negara yang bersih dan bebas KKN.
4	- Pasal 41 dan 42 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	- Masyarakat/LSM diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; - Pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5	- UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Pasal 139 (1) UU No. 32 Tahun 2004	- Dalam perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan masyarakat/LSM melalui musyawarah perencanaan pembangunan; - Masyarakat/LSM di harapkan memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.
6	- Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1985 jo. UU.No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	- Diakui keberadaan organisasi kemasyarakatan/ LSM sebagai penyalur aspirasi dan ikut nebyukseskan pembangunan nasional
7	- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 - Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat.	- Diharapkan partisipasi peran serta masyarakat/ LSM untuk ikut mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN dengan mentaati hukum, moral, dan norma sosial yang berlaku.
8	- Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 - Tentang Pembinaan LSM	- LSM merupakan wadah partisipasi masyarakat; - Keberadaan LSM di akui sebagai mitra pemerintah.

Sumber : Bahap Hukum Primer, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa kedudukan LSM kuat karena sebagai negara demokrasi rakyat menempati posisi yang pertama. Sehingga kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap orang maupun organisasi/LSM di jamin oleh Undang-Undang Dasar. LSM mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat karena LSM merupakan pilar demokrasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat. Hubungan LSM dengan pemerintah cukup berkembang intensip, sehingga keberadaan LSM di akui sebagai mitra pemerintah.

3.1.6. Kode Etik LSM

Dalam kode etik ini diatur mengenai

prinsip-prinsip integritas keberadaan LSM yang disebutkan antara lain bahwa, (1). LSM adalah organisasi non pemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. (2). LSM adalah organisasi non-partisan dan karena itu tidak merupakan bagian atau berafiliasi dengan partai-partai politik dan tidak akan menjalankan politik praktis dalam arti mengejar kekuasaan. (3). LSM adalah lembaga non-sektarian dan membebaskan dirinya dari prasangka-prasangka atas dasar segala perbedaan, termasuk agama,

suku, ras, golongan dan gender. (4). LSM didirikan dengan visi dan misi yang jelas memihak masyarakat marjinal, dan tidak untuk semata-mata mencari proyek. (5). LSM didirikan dengan orientasi tidak mencari keuntungan untuk dibagi-bagikan kepada pendiri dan pengurusnya, melainkan untuk mengabdikan kepada sesama umat manusia dan kemanusiaan. (6). LSM berpegang pada prinsip-prinsip pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. (7). LSM dalam mewujudkan visi dan misinya tidak melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

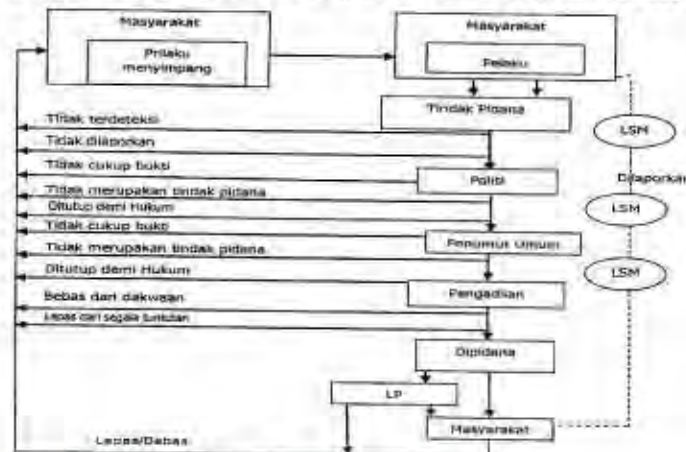
C. Ruang Gerak LSM Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem dalam peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana. Sesungguhnya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk usaha

dalam menaggulangi masalah kejahatan. Bila dilihat dari pengertian ini, LSM dapat masuk dalam sistem, karena merupakan kelompok atau bagian dari masyarakat yang berusaha ikut aktif dalam menanggulangi kejahatan khususnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun kalau dilihat pengertian sistem peradilan pidana menurut aturan perundang-undangan, di situ hanya termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. LSM tidak masuk, atau berada di luar sistem. Akan tetapi dalam kenyataannya, khususnya dalam perkara korupsi, LSM dapat memperlancar dan mempercepat proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena LSM selalu mengawal dan mengontrol setiap tindakan penegak hukum dalam memeriksa perkara-perkara korupsi.

Secara sederhana sistem peradilan pidana yang merupakan proses pemeriksaan perkara pidana, dapat digambarkan posisi LSM seperti bagan di bawah ini.

Bagan: 1 Posisi LSM Dalam Sistem Peradilan Pidana



Sumber: Bahan hukum primer dan sekunder, diolah.

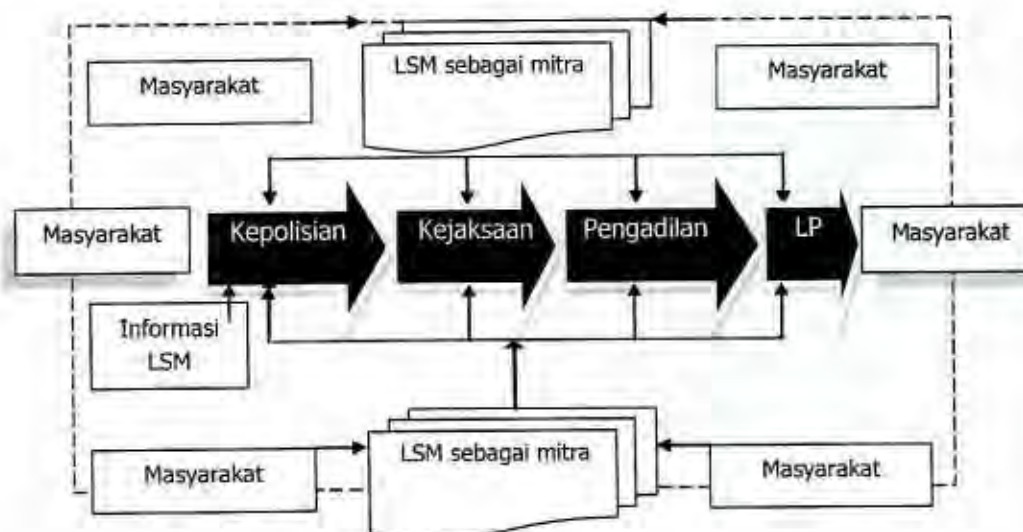
Bagan di atas LSM sesungguhnya berada di luar sistem, (dalam gambar garis putus-putus, menunjukkan hubungan yang tidak formal). Walaupun keberadaan LSM di luar sistem formal, tetapi LSM dapat masuk sebelum kasusnya diperiksa. Kewenangan LSM ini terbatas pada memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Setelah penyampaian informasi, LSM juga dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Jadi kedudukan LSM hanya terbatas pada pemberian informasi kepada aparat penegak hukum ataupun KPK dan menyampaikan saran.

Walaupun secara formal LSM ada di luar sistem, tetapi tetap dapat ikut berpartisipasi sehingga mampu mempengaruhi interaksi, interkoneksi,

maupun interdependensi melalui sub-sub sistem peradilan pidana yang sangat mendapat dukungan dari masyarakat karena terbukti dapat mempercepat dan mengungkap secara lebih luas kasus-kasus korupsi baik di daerah maupun di pusat.

Dengan pengaturan yang jelas ruang gerak LSM dalam sistem peradilan, maka proses peradilan khususnya dalam pemeriksaan perkara korupsi, akan lebih terbuka bagi masyarakat/LSM untuk ikut berperanserta sehingga pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian ruang gerak LSM tetap berada di luar sistem peradilan pidana. Ke depan, ruang gerak LSM diharapkan dapat sebagai mitra pemerintah khususnya penegak hukum. Sehingga ruang gerak LSM pada masa yang akan datang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2 : Ruang Gerak LSM di Masa Mendatang.



Berdasarkan bagan di atas, ke depan diharapkan ruang gerak LSM dalam sistem peradilan pidana dapat diposisikan sebagai “mitra” dari lembaga-lembaga pemerintahan khususnya lembaga penegak hukum maupun KPK yaitu, Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) agar tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien yaitu, jangka pendek resosialisasi, jangka menengah mencegah kejahatan dan jangka panjang meningkatkan kesejahteraan sosial.

D. Beberapa Alasan Ruang Gerak LSM Kurang Proporsional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sehubungan dengan ini, kiranya dapat dikemukakan beberapa alasan kenapa ruang gerak LSM kurang proporsional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- a). Masih ada sebagian pejabat pemerintahan yang cenderung negatif terhadap LSM yang terlalu banyak mencampuri urusannya. Karena masih kuatnya pandangan bahwa pemerintah dan aparatnyalah yang menjadi penanggung jawab tunggal baik dalam perencanaan, strategi maupun pelaksanaan pembangunan. Sikap seperti ini tidaklah berarti bahwa pemerintah menutup partisipasi masyarakat/LSM dalam proses pembangunan, akan tetapi asalkan partisipasi tersebut sebatas mendukung dana atau tenaga, dan bukan upaya-upaya berupa pemikiran alternatif baik dalam pemberian makna dari pembangunan itu sendiri, maupun proses perencanaan, strategi dan pelaksanaannya;
- b). Berkaitan dengan rasa kekhawatiran dari sebagian pejabat pemerintahan dengan rasa kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan LSM dipakai sebagai wahana penyebaran ideologi asing yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi dan budaya politik Indonesia. Secara kebetulan memang banyak LSM di Indonesia yang memperoleh bantuan dana dari luar negeri. Fakta ini dianggap cukup kuat untuk mencurigai tujuan dan kegiatan dari LSM;
- c). Pembuat undang-undang belum memahami sepenuhnya pentingnya mendorong tata hubungan yang lebih seimbang antara sektor negara, privat atau swasta dengan publik atau masyarakat sipil yang merupakan pilar penting dalam pemerintahan;
- d). Pembentuk undang-undang sudah menganggap cukup pengaturan dalam Bab V khususnya Pasal 41 dan 42 UU. Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Karena baru untuk

pertama kalinya masyarakat diajak ikut serta, apalagi kesan organisasi kemasyarakatan khususnya LSM pada masa Orde Baru, masih terbawa karena sering pada masa itu dianggap melawan pemerintah.

E. Perumusan Ruang Gerak LSM Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang

1. Faktor Penunjang Dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi LSM

1.1. Faktor Penunjang

Faktor penunjang yang utama dari upaya LSM dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah besarnya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan memberikan pengaruh kekuatan atau menampakkan sisi yang hidup dari suatu organisasi LSM. Organisasi LSM sebagai sistem yang terbuka (*open system*) dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya, sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian akan nampak jelas, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi LSM, dapat dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern, atau internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut saling

berinteraksi dan saling mempengaruhi.

Faktor pendukung yang sangat menentukan dalam suatu organisasi adalah pengelola dari organisasi tersebut. Pengelola organisasi dalam arti ini, dimaksudkan sebagai proses yang mengatur dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Secara umum pengelola organisasi bertanggungjawab atas berhasil tidaknya perjalanan organisasi tersebut dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Dengan demikian faktor-faktor pendukung dalam partisipasi pelaksanaan fungsi LSM di antaranya meliputi :

- a. dukungan dari masyarakat luas, karena LSM yang baik adalah LSM yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat tanpa pamrih. Sumber daya manusia yang dimiliki LSM adalah mereka yang memiliki idealisme dan berani berkorban/relawan. Faktor staf relawan sangat berpengaruh terhadap fungsi LSM, karena sumber daya manusia merupakan kunci kesuksesan dari suatu organisasi. LSM adalah organisasi yang nirlaba, karena itu aset pentingnya adalah para staf yang memiliki idealisme dan relawan.
- b. LSM dengan mudah untuk

mendapat bantuan tenaga-tenaga ahli/expert, karena banyak ahli-ahli sesuai dengan bidangnya ingin membantu LSM. Terutama dalam melaksanakan fungsinya sebagai motivator.

- c. Adanya komitmen dari pemerintah untuk “mengganyang mafia peradilan”. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengaku gusar melihat adanya mafia di bidang hukum yang lebih dikenal dengan “makelar kasus” (markus).

1.2.. Faktor Penghambat

Salah satu persoalan penting yang dihadapi kalangan LSM saat ini adalah masalah keuangan/pembiayaan. Karena mayoritas LSM sangat tergantung pada bantuan hibah, khususnya dari lembaga-lembaga penyandang dana dari luar negeri. Masalah ketergantungan dana dari pihak lain ini, bukan saja mengancam keberlanjutan kehidupan LSM, tetapi juga akan banyak mempengaruhi hal-hal lainnya, terutama kemandirian dalam mewujudkan visi dan misinya.

Di samping keterbatasan dana, LSM dalam melakukan aktivitasnya masih banyak menghadapi hambatan/kendala yang bersifat internal, antara lain :

- a. keahlian dalam mengelola organisasi, Karena, kecuali pimpinan/pengurus harian, pengganggas atau pendiri, yang memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Sedangkan anggota yang lainnya kebanyakan masih pemula, yang hanya memiliki modal untuk berbicara dan keberanian tampil di depan publik;
- b. keterbatasan kapasitas kelembagaan, seperti terbatasnya sekretariat yang dimiliki, kondisi ruangan yang sangat sempit, jauh dari pusat kota, fasilitas perkantoran sangat terbatas, sehingga administrasi sangat terhambat. Demikian pula fasilitas komunikasi, dan lain-lain.
- c. keberlanjutan organisasinya rendah, komitmen dari masing-masing pengurus maupun anggota lainnya dalam mewujudkan visi dan misinya masih rendah. Hal ini disebabkan karena seringkali pembentukan lembaga LSM didasari oleh kepentingan sesaat bila muncul suatu masalah. Setelah masalahnya selesai, aktivitas organisasinya menurun, apalagi tidak ditunjang oleh dana, akhirnya organisasi tidak terurus;

- d. kurangnya komunikasi antar organisasi sesama LSM dan/atau koordinasi sesama organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini disebabkan karena masing-masing organisasi LSM merasa dirinya memiliki kemandirian dan kemampuan yang cukup dalam menghadapi berbagai permasalahan. Padahal, komunikasi sangat penting dilakukan dalam menghadapi masalah, terutama antar LSM yang memiliki visi dan misi yang sama;
 - e. kurangnya pemahaman konteks sosial, politik, dan ekonomi. Terhadap LSM yang baru berdiri, biasanya pimpinan dan anggotanya kurang memiliki wawasan yang luas, apalagi mereka kurang didampingi oleh pendamping atau nara sumber yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga dalam menghadapi masalah seringkali independensinya terganggu oleh faktor politik maupun ekonomi;
 - f. jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai masih sangat minim. Seringkali LSM dalam merekrut anggota, yang dipentingkan adalah mereka yang punya keberanian untuk mengungkap suatu masalah.
- Padahal di samping keberanian, mereka harus pula memiliki kelebihan dalam menggunakan ratio.
- g. kegiatannya kurang kontinyu, terutama dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat. Biasanya LSM baru ikut aktif bilamana masalahnya sudah menjadi sorotan publik. Padahal LSM seharusnya selalu tanggap terhadap mereka atau masyarakat yang tertindas atau dirugikan karena ketidakberdayaannya;
 - h. masih kurangnya kegiatan sosialisasi, jika-pun ada, masih menggunakan media umum. Masyarakat seringkali kurang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh LSM. Dan masyarakat belum banyak mengetahui apa fungsi dari LSM, sehingga masyarakat masih belum “akrab” dengan LSM untuk diajak ikut menyelesaikan masalah-masalah sosial, hukum, maupun politik.
- F. Konsep Rumusan Ruang Gerak LSM Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Masa Mendatang
- Berdasarkan uraian di atas, ke depan LSM dapat dikembangkan ruang geraknya sesuai dengan Proses Pembaharuan Gerakan

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

(a). Hak LSM untuk melakukan pengawasan dan/atau menggugat penegak hukum, pejabat publik, BUMN/BUMD yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Landasan teoritis, hak ini diberikan dengan pertimbangan, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰ Maksudnya, melalui pengawasan ini korupsi dapat dicegah dan diberantas sesuai dengan yang direncanakan.

Landasan yuridisnya adalah, Article 13 UNCAC 2003: *Participation of Society* (Keikutsertaan Masyarakat); Article 38 UNCAC 2003: *Cooperation Between National Authorities* (Kerjasama dengan Otoritas-otoritas Nasional); Pasal 5 UU. Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Landasan filosofisnya adalah bahwa, hak untuk melakukan pengawasan ini dalam rangka mewujudkan keadilan. Selanjutnya terkait keadilan atas melanggar sumpah jabatan yang diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi ingkar tidak

menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga terjadi korupsi (sebagai perspektif keadilan sesuai dengan tanggung jawab terhadap sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”). Demikian pula untuk perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

(b). Hak LSM untuk mengajukan alat-alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara korupsi dan/atau mengajukan keberatan atau gugatan terhadap penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang telah menghentikan penyidikan atau penuntutan atau tidak melaksanakan eksekusi tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hak ini diberikan dengan pertimbangan, Landasan teoritik, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena itu alat bukti merupakan hal yang sangat penting dalam perkara korupsi. Adapun alat-alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Landasan yuridisnya antara lain meliputi, Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 UU. Nomor 28 tahun 1999 tentang

¹⁰ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 19.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. PP. Nomor 71 tahun 2000 Khususnya Bab II tentang Hak Tanggungjawab Masyarakat Dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran dan Pendapat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, khususnya Pasal 35 UNCAC 2003.

Landasan filosofisnya, adalah keadilan atas kejahatan terhadap hak-hak kemanusiaan dengan tidak adil dan beradab yang berakibat meningkatnya penderitaan, kesengsaraan dan berbagai penyakit masyarakat. Keadilan atas perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuangan Negara yang berakibat terganggunya tatanan kehidupan masyarakat dan kesejahteraan rakyat yang menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan penerapan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi (perspektif dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

(c). Hak LSM untuk mengajukan gugatan atau keberatan terhadap Pemerintah yang tidak memberikan premi atas jasa pelapor sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Landasan teoritik, hak ini diberikan dengan pertimbangan bahwa, untuk menghargai partisipasi dan untuk lebih

merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat/LSM sebagai perwujudan dari peningkatan kualitas demokrasi.

Adanya payung hukum yang mengatur yaitu: Pasal 35 UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dengan UU. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Pasal 42 ayat (1) dan (2), UU. Nomor 31 tahun 1999 jo. UU. Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 dan Pasal 8, PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Landasan filosofisnya, adalah keadilan dan transparansi serta akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan; Demikian pula penyadaran dan pengorganisasian masyarakat di bidang hak-hak warga Negara dan pelayanan publik, sebagai perspektif dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

(d). Hak LSM untuk mengajukan keberatan atau gugatan terhadap Pemerintah yang tidak memberikan perlindungan sewajarnya kepada pelapor, saksi maupun korban sesuai dengan haknya yang telah dijamin oleh undang-undang.

Landasan Teoritik, hak ini diberikan dengan pertimbangan bahwa, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat

bergantung pada alat bukti (keterangan saksi) yang berhasil diungkap atau ditemukan.

Adanya landasan hukum yang kuat yaitu: UNCAC Tahun 2003 Pasal 33 tentang Perlindungan Para Pelapor yang telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, yaitu, mengambil tindakan yang tepat terhadap perlakuan yang tidak adil bagi setiap orang yang dengan ihtikad baik dan dengan alasan yang rational melaporkan kepada otoritas-otoritas yang berwenang setiap fakta mengenai kejahatan korupsi. Pasal 31 dan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu pada Pasal 15 mengenai Perlindungan Saksi dan Pelapor; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 PP. Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Landasan filosofisnya, adalah keadilan yang merupakan tujuan dari masyarakat manusia, kecendrungan yang kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

(e). Hak LSM mengusulkan pencekalan terhadap mereka/politisi yang

berindikasi korupsi dan/atau hak LSM mengajukan keberatan atau gugatan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan RAN-PK yang telah dibuat atau mengeluarkan kebijakan yang menghambat proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Landasan teoritik, hak ini diberikan dengan pertimbangan bahwa, secara teori demokrasi, keterlibatan rakyat diharapkan ikut berpartisipasi aktif bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara. Mencekal adalah memegang atau melarang. Pencekalan dalam hal ini dimaksudkan adalah melarang untuk berpergian ke luar negeri bagi mereka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi. Pencekalan ini dilakukan oleh LSM dengan mengajukan permohonan pencekalan kepada pihak yang berwenang. Adanya payung hukum yang mengatur yaitu Pasal 5 dan Pasal 13 serta Pasal 35 UNCAC Tahun 2003, yang telah diratifikasi dengan UU. Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Pasal 8 UU. Nomor 28 tahun 1999, yaitu peran-serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Landasan filosofisnya, yaitu, perlindungan terhadap pelayanan, keadilan dan kesejahteraan, sebagai perspektif keadilan sesuai dengan sila kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ruang gerak sesuai dengan fungsi LSM

tersebut di atas, dituangkan dalam bentuk hukum berupa undang-undang atau disisipkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan agar LSM memiliki dasar hukum yang kuat yaitu, hak yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan.

G. PENUTUP

1. Simpulan

- 1.1. Ruang gerak LSM baik berdasarkan ketentuan Internasional maupun ketentuan di beberapa negara serta di Indonesia, diakui keberadaannya. Kedudukan LSM tidak dapat disamakan dengan lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, karena prinsip dan sifat LSM adalah organisasi non pemerintah yang independen dan mandiri.
- 1.2. Sampai saat ini undang-undang yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan termasuk LSM, adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Dasar pertimbangan undang-undang ini dibuat, adalah untuk meningkatkan fungsi keikutsertaan masyarakat secara aktif menumbuhkan kepeduliannya

terhadap pembangunan, (termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi). LSM yang bergerak dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang lebih khusus yaitu :

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum;
- b. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelidikan dan pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi;
- c. menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik dan birokrasi pemerintahan secara kondusif untuk percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. memfasilitasi penguatan *good governance* di kalangan masyarakat sipil;
- e. mempublikasikan hasil-hasil kajian ilmiah (eksaminasi putusan) terhadap putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;
- f. mendidik dan membina

kader-kader anti korupsi yang militan, serta mampu mengkampanyekan anti korupsi dalam setiap kesempatan;

- g. penguatan penegakkan standar etika di kalangan profesi (hukum)

Berdasarkan fungsi kewajiban tersebut, sesungguhnya dari aspek yuridis, LSM memiliki ruang gerak hak yang sangat terbatas, terutama belum dijabarkannya hak yang masih terbuka untuk diadopsi/dikembangkan seperti yang diatur dalam UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, juga berdasarkan perbandingan dari beberapa negara. Oleh karena itu, di masa mendatang LSM diharapkan memiliki fungsi ruang gerak yang lebih luas yaitu, berupa hak seperti :

- (a). Hak LSM untuk melakukan pengawasan dan/atau mengajukan keberatan atau gugatan terhadap penegak hukum, pejabat publik, BUMN/BUMD yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (b). Hak LSM mengajukan alat-alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara korupsi dan/atau mengajukan keberatan atau gugatan terhadap

penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang telah menghentikan penyidikan atau penuntutan atau tidak melaksanakan eksekusi tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan;

- (c). Hak LSM mengajukan keberatan atau gugatan terhadap pemerintah yang tidak memberikan premi atas jasa pelapor sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (d). Hak LSM mengajukan keberatan atau gugatan terhadap pemerintah yang tidak memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada pelapor, saksi maupun korban sesuai dengan haknya yang telah dijamin oleh undang-undang; dan
- (e). Hak LSM untuk mengusulkan pencekalan kepada pejabat yang berwenang bagi mereka/politisi yang berindikasi korupsi, dan/atau mengajukan keberatan atau gugatan terhadap Pemerintah yang tidak melaksanakan RAN-PK yang telah dibuat, atau mengeluarkan kebijakan yang menghambat proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sudah tentu LSM-LSM yang diberikan hak seperti tersebut di atas, adalah LSM yang telah disaring dan telah terbukti perjuangannya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Saran

Agar LSM memiliki ruang gerak dalam menjalankan fungsinya secara efektif, diharapkan kepada pemerintah, untuk memberikan perhatian kepada LSM mencakup hal-hal sebagai berikut: Pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit tentang kedudukan/keberadaan, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat yang akan menjadi landasan hukum bagi LSM untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, adanya pengakuan/jaminan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah, bahwa LSM dapat bekerja secara independen dengan berbagai kegiatannya pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional tanpa hambatan; Ketiga, menjamin akses LSM terhadap sumberdaya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya; Keempat, melakukan dialog dan konsultasi antara pemerintah dengan LSM-LSM yang dilandasi oleh semangat kemitraan untuk mendukung program pemerintah. Di lain pihak, pemerintah harus benar-benar selektif (memiliki kriteria) memberi kesempatan kepada LSM yang sungguh-sungguh telah teruji bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. (RNB - YG)

DAFTAR PUSTAKA

Clark John, 1995, *Democratizing Development The Role of Voluntary Organi-*

zations, (NGO dan Pembangunan Demokrasi), terjemahan Godril Dibyo Yuwono, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Emerson Yuntho, Indonesia Corruption Wach, *Tantangan dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar 8 Desember 2011.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Gap Analysis Indonesian Laws versus The United Nations Convention Against Corruption (draft report)*, Tanpa tahun.

Nam-Joo Lee, "Korea's Anti-Corruption Strategies and The Role of Private Sector", *UN Round Table Presentation, December 9, 2003, Korea Independent Commission Against Corruption*.

Serikat Putra Jaya I Nyoman, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Transparency Internasional Indonesia (TII), *Praktek-praktek yang Baik Dalam Memerangi Korupsi di Asia*,

Peraturan Perundang-undangan:

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor

- VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Intruksi Presiden Republik Indonesia, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tetang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Koran dan Internet
- Bali Post, 20 Februari 2012; Kompas, Senin 28 Nopember 2011
- www.fsrtd.itb.ac.id